



DISKUSI PENGEMBANGAN KERJA SAMA DAERAH BIDANG KETAHANAN PANGAN FORUM KERJA SAMA DAERAH MITRA PRAJA UTAMA

Jakarta, 10 Januari 2025

PROVINSI ANGGOTA FORUM KERJASAMA DAERAH MITRA PRAJA UTAMA



**Provinsi
Daerah Khusus Jakarta**



Provinsi Jawa Barat



Provinsi Jawa Tengah



Provinsi Jawa Timur



**Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta**



Provinsi Bali



Provinsi Jawa Lampung



**Provinsi Nusa
Tenggara Barat**



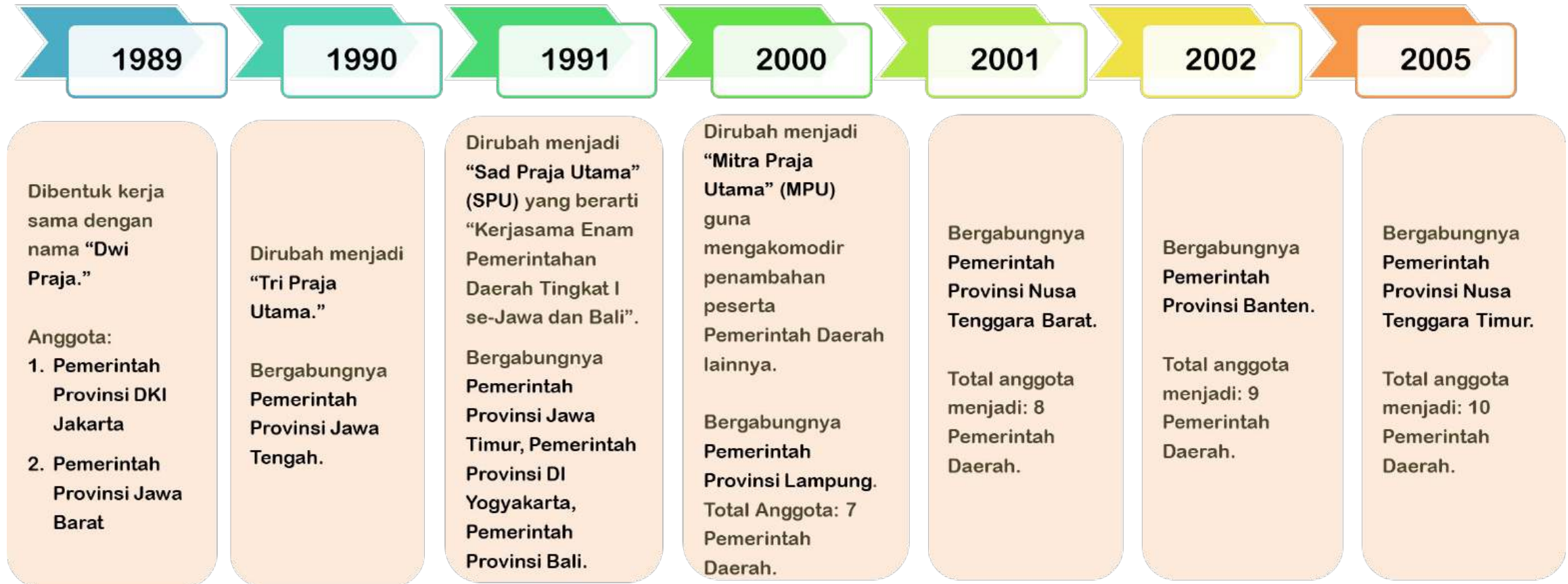
Provinsi Banten



**Provinsi Nusa
Tenggara Timur**



SEJARAH FORUM KERJASAMA DAERAH MITRA PRAJA UTAMA



SUSUNAN ORGANISASI FKD MPU



Tugas Pokok Dewan Pengawas:

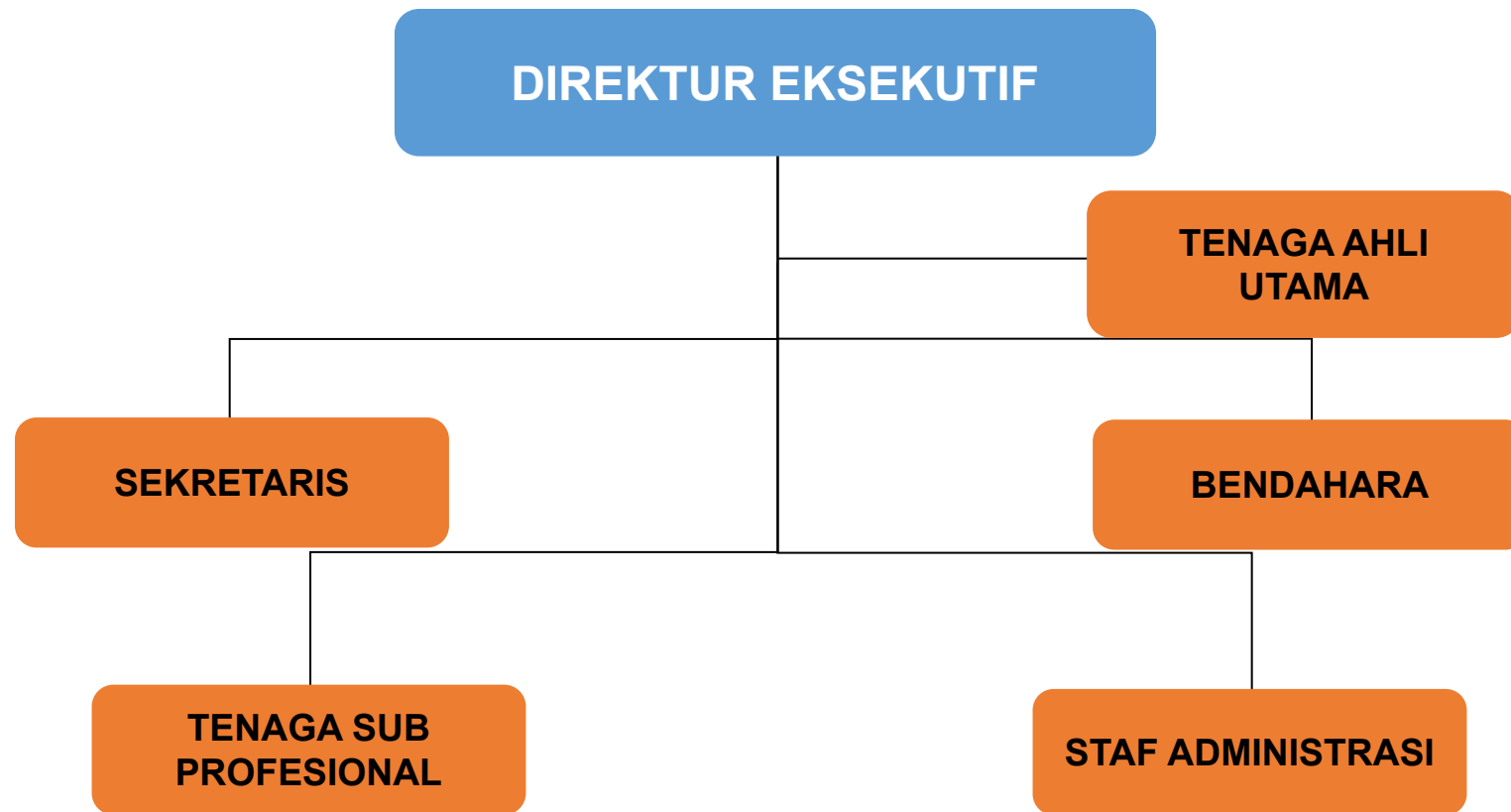
1. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan agenda Rapat MPU
2. Mengawasi dan mengevaluasi tugas Sekretariat Bersama MPU
3. Mengangkat dan memberhentikan Direktur Eksekutif
4. Meminta pertanggungjawaban keuangan Sekretariat Bersama MPU yang telah diaudit oleh akuntan publik setiap tahun
5. Mengawasi pelaksanaan kerja sama MPU di daerah masing-masing

Status Direktur Eksekutif:

1. Diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan SK Dewan Pengawas
2. Pemilihan Direktur Eksekutif ditetapkan dalam Rapat Dewan Pengawas
3. Direktur Eksekutif bertanggungjawab kepada Dewan Pengawas
4. Periode masa tugas: 3 tahun dan dapat dipilih kembali



STRUKTUR SEKRETARIAT BERSAMA FKD – MPU





PRIORITAS PROGRAM SEKBER FKD-MPU

1. Kolaborasi untuk Stabilisasi Harga Pangan
2. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3. Optimalisasi Potensi Pariwisata
4. Kerja Sama Transportasi di Kawasan Aglomerasi
5. Kerja Sama Perdagangan



MILESTONE PROGRAM KERJA FORUM KERJA SAMA DAERAH MITRA PRAJA UTAMA (FKD-MPU) TAHUN ANGGARAN 2025 SEMESTER I

JANUARI (MINGGU KE-4) 2025

Dialog dengan stakeholder untuk mendorong pembangunan pariwisata nasional khususnya FKD-MPU dengan melibatkan K/L terkait (Kemenkeu/Dirjen Pajak, Kemenlu, Kementerian Imigrasi, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Kadis Pariwisata, ASITA, PHRI).

FEBRUARI (MINGGU KE-3) 2025

Perumusan Point-point dan Penyepakatan Perjanjian Kerja Sama Bidang Ketahanan Pangan dan Perdagangan Bahan Pokok Bergejolak. Pada forum ini mengundang dan memfasilitasi para pelaku usaha bidang pangan dan perdagangan untuk melakukan diskusi potensi kerja sama antar anggota FKD-MPU. (Turut mengundang KADIN 10 provinsi anggota FKD-MPU).

FEBRUARI (MINGGU KE-2) 2025

Perumusan Point-point dan Penyepakatan Perjanjian Kerja Sama Bidang Pariwisata dan Travel Pattern.

MARET (MINGGU KE-1) 2025

Pembahasan dan Penyusunan Proposal Promosi Produk UMKM dan Pariwisata 10 (Sepuluh) Provinsi Anggota FKD-MPU yang Akan Diajukan kepada Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Pada forum ini mengundang dan memfasilitasi para pelaku usaha bidang pangan dan perdagangan untuk melakukan diskusi potensi kerja sama antar anggota FKD-MPU. (Turut mengundang KADIN 10 provinsi anggota FKD-MPU).



MILESTONE PROGRAM KERJA FORUM KERJA SAMA DAERAH MITRA PRAJA UTAMA (FKD-MPU) TAHUN ANGGARAN 2025 SEMESTER I

MARET (MINGGU KE-3) 2025

Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) Sesuai Surat **Kesepakatan Bersama Antar Gubernur Provinsi Anggota FKD-MPU Nomor 06/SK/MPU/2023 Diselenggarakan di Provinsi Bali** dengan Pokok Bahasan Menetapkan Kebijakan Program Kerja Sama dan Kebijakan Lain FKD-MPU dalam Bentuk Kesepakatan Bersama Gubernur Provinsi FKD-MPU (Selambat-lambatnya Bulan Maret).

APRIL (MINGGU KE-3) 2025

Rakor evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh *leading sector* terkait.

MEI (MINGGU KE-3) 2025

Rapat Gabungan Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) Sesuai Surat **Kesepakatan Bersama Antar Gubernur Provinsi Anggota FKD-MPU Nomor 06/SK/MPU/2023 Diselenggarakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur** dengan Pokok Bahasan Menindaklanjuti Kesepakatan Bersama Gubernur Tahun 2025 dalam Bentuk Perjanjian Kerja Sama antar SKPD/OPD Provinsi Anggota FKD-MPU (Selambat-lambatnya Bulan Juni).

JUNI (MINGGU KE-2) 2025

Kegiatan Narasi Nusantara Berkolaborasi dengan ASITA di Acara Bali Beyond Travel Fair (BBTF) Berlokasi di ITBC Nusa Dua Bali (pada tanggal 11-13 Juni 2024). Pada forum ini turut mengundang Kedubes/Konjen potensial untuk membahas kelemahan dan dukungan terhadap pariwisata Indonesia.



MILESTONE PROGRAM KERJA FORUM KERJA SAMA DAERAH MITRA PRAJA UTAMA (FKD-MPU) TAHUN ANGGARAN 2025 SEMESTER 2

JULI (MINGGU KE-2) 2025

Bussines Matching Forum dan Pagelaran Seni-Budaya yang akan diselenggarakan di salah satu provinsi anggota FKD-MPU. Turut mengundang pelaku usaha 10 provinsi anggota FKD-MPU.

AGUSTUS (MINGGU KE-3) 2025

Forum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pagelaran Seni-Budaya yang akan diselenggarakan di salah satu provinsi anggota FKD-MPU.

NOVEMBER (MINGGU KE-3) 2025

Monitoring dan Evaluasi Program Kerja Sama FKD-MPU.
(Dilaksanakan bulan november)

AGUSTUS (MINGGU KE-1) 2025

Kegiatan Colour of Culture Festival (CoCF) yang akan Diselenggarakan di Salah Satu Provinsi Anggota FKD-MPU.

OKTOBER (MINGGU KE-2) & NOVEMBER (MINGGU KE-1) 2025

Pagelaran Seni dan Budaya yang akan diselenggarakan di salah satu provinsi anggota FKD-MPU.



DAFTAR PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS) BIDANG KETAHANAN PANGAN FKD-MPU

Sudah Berakhir

No.	Nomor & Tanggal PKS	Isi PKS
1	Nomor 86/PKS/MPU/2019 (7 November 2019-6 November 2024)	Kerjasama perdagangan offline dan online Provinsi anggota melalui perdagangan di bidang produk unggulan yang terstandarisasi dan komoditi, melalui promosi bersama dan pembuatan aplikasi yang dibuat oleh Sekber MPU.
2	Nomor 88/PKS/MPU/2019 (7 November 2019-6 November 2024)	Pengelolaan integrasi informasi pangan anggota MPU dengan cakupan informasi harga pangan daerah serta mekanisme monitoring dan evaluasi.



MEKANISME KERJA SAMA G2G

1. Penandatanganan PKS	:	a. Isi MoU mencakup komitmen masing-masing pihak terhadap alokasi sumber daya, pertukaran teknologi, regulasi perdagangan, dan perlindungan produk pangan. b. Biasanya mengatur hal-hal seperti volume perdagangan produk pangan tertentu, stabilitas harga, atau jaminan pasokan dalam kondisi krisis.
2. Penghapusan Hambatan Perdagangan	:	Kerja sama untuk menyederhanakan tarif, non-tariff barriers, atau menyelaraskan standar keamanan pangan antar provinsi.
3. Transfer Teknologi dan Pengetahuan	:	Pemerintah bekerja sama dalam mengembangkan kapasitas teknis dan produksi pangan melalui pelatihan, riset bersama, atau bantuan teknologi.



MEKANISME KERJA SAMA G2B

1. Kemitraan Publik-Swasta atau <i>Public-Private Partnership</i> (PPP)	:	a. Pemerintah memberikan insentif kepada sektor swasta untuk berinvestasi dalam infrastruktur, distribusi, atau inovasi teknologi di bidang pangan. b. Contoh: Pembangunan gudang pangan atau fasilitas cold storage dengan pembiayaan bersama.
2. Fasilitas Perdagangan dan Investasi	:	Pemerintah mempermudah bisnis swasta melalui regulasi yang lebih fleksibel, akses pasar, atau promosi produk lokal di pasar internasional.
3. Promosi Produk Lokal	:	Mendorong perusahaan untuk ekspor produk pangan dengan memberikan subsidi, sertifikasi halal, atau akses jaringan distribusi.



PAKET RENCANA PERJANJIAN KERJA SAMA FKD-MPU TAHUN 2025

Tentang	:	Sinkronisasi Kebijakan Ketahanan Pangan Provinsi Anggota FKD-MPU
Status	:	Baru
Para Pihak	:	10 Provinsi Anggota FKD-MPU
Keterangan	:	1. Prognosa Neraca Pangan <i>*Prognosa Neraca Pangan adalah data yang menyajikan informasi perkiraan ketersediaan, kebutuhan dan surplus/deficit komoditas pangan di suatu wilayah pada periode waktu tertentu.</i> 2. Fasilitasi kerja sama Pemenuhan dan Penjualan komoditas Pangan (10 Provinsi) a. Beras b. Bawang Merah c. Cabai Merah d. Telur Ayam Negeri e. Daging sapi f. Daging Ayam 3. Pemasaran produk Pertanian, Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (Bali – Jawa – Timur – NTB – Lampung - Jawa Barat)



Keterangan	: 4. Identifikasi kebutuhan dan pemasaran produk Olahan Peternakan (Bali – Jawa Timur – NTB – Lampung - Jawa Barat) 5. Tata niaga ternak ruminansia kecil, ruminansia besar dan unggas a. Pengelolaan lalu lintas bibit unggas (DOC, DOD, DOQ) dan ruminansia kecil kambing (Jawa Timur – NTB) b. Pengelolaan lalu lintas ternak Sapi dan Kerbau ke wilayah Jabodetabek (NTB – Jawa Barat – Banten – Jakarta) c. Pengawasan lalu lintas hewan untuk pencegahan penyakit menular hewan d. obat-obatan hewan 6. Fasilitas kerja sama industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan e. Pemetaan informasi industri penerima hasil pertanian, peternakan, perikanan f. Peningkatan kapasitas SDM untuk memproduksi sesuai kebutuhan industri
-------------------	--



Keterangan	: 7. Kerja Sama BUMD dan/atau Badan Hukum yang menangani Bidang Pangan antar Provinsi Anggota FKD-MPU 8. Pengembangan kapasitas SDM dan studi tiru dalam inovasi pelayanan bidang peternakan (10 Provinsi) 9. Pelatihan dan pendampingan pengolahan hasil pertanian pasca panen (NTT – Jakarta)
-------------------	--



PAKET RENCANA PERJANJIAN KERJA SAMA FKD-MPU TAHUN 2025

Tentang	:	Kerja Sama Distribusi Hewan Ternak Asal NTT
Status	:	Baru
Para Pihak	:	NTT, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur
Keterangan	:	1. Distribusi Ternak Hidup asal NTT melalui Tol Laut <i>(Saat ini tersedia 5 kapal tol laut untuk trayek 4 provinsi. Sedang diupayakan trayek menuju pulau sumatera melalui Lampung)</i> 2. Distribusi Daging Sapi Beku 3. Penjualan Produk olahan daging sapi asal NTT <i>(Daging Asap, Abon, Dendeng)</i>



Keterangan	: 4. Peningkatan iklim beternak khususnya unggas untuk pemenuhan kebutuhan ayam dan telur. Dengan penyediaan pakan/obat lebih murah. 5. Peternakan sapi perah dalam skala besar untuk memenuhi kebutuhan susu dalam upaya pengentasan stunting. 6. RPH atau industri pengolahan karkas sapi
-------------------	--



TERIMA KASIH

